

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Membicarakan mengenai isu dalam ilmu hubungan internasional, studi kesetaraan gender secara umum bukanlah menjadi salah satu isu utama yang dibicarakan secara masif. Hal ini disebabkan karena disiplin ilmu hubungan internasional sendiri muncul pada periode Perang Dunia I, yang kemudian membuat disiplin ilmu hubungan internasional lebih berfokus kepada studi tentang perang dan perdamaian antar negara atau singkatnya studi *high politics*. Namun, seiring dengan berjalannya waktu isu-isu mengenai gender menjadi perhatian karena berbagai studi mengenai gerakan feminisme dalam hubungan internasional berhasil menarik perhatian masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan oleh adanya identifikasi baru mengenai eksistensi perempuan di dunia politik dan berbagai gerakan yang disuarakan oleh perempuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan di negaranya, baik itu kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.

Implementasi kesetaraan gender dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri merupakan suatu hal yang dewasa ini menjadi hal yang umum bagi seluruh negara di dunia. Bahasan mengenai kesetaraan gender sudah menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Keberadaan perempuan dalam dunia politik juga memberikan sebuah harapan dalam pengimplementasian kesetaraan gender dalam aksi kebijakan luar negeri. Hal tersebut tentunya juga memberikan negara pandangan terhadap asas demokrasi dimana seluruh masyarakat memiliki hak untuk memasuki dunia politik tanpa memandang gender dari individu itu sendiri, karena adanya simbolis demokrasi yang berbunyi 'dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat' yang bermaksud untuk memberikan kebebasan bagi seluruh individu untuk memberikan pandangan terhadap kebijakan bagi suatu negara tanpa memandang gender dari rakyat yang ada.

Para aktor feminis dalam hubungan internasional beranggapan bahwa perang dan perdamaian, serta konflik dan kerja sama merupakan aktivitas gender. Berdasarkan pada studi yang dilakukan oleh Amy Swerdlow (1990: p. 9 & p. 23), dikemukakan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an memiliki kontribusi yang sedikit banyak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan Presiden John Fitzgerald Kennedy pada perjanjian pengendalian senjata nuklir yang dilakukan bersama dengan Uni Soviet. Gerakan tersebut kemudian membangunkan gerakan-gerakan perempuan lain untuk menuntut sebuah perubahan demi mendapatkan kesetaraan. Kemelekan pemangku kebijakan yang adalah pemerintah terhadap kesetaraan gender memberikan sebuah harapan baru bagi gerakan-gerakan yang telah ada untuk memperjuangkan hal yang serupa.

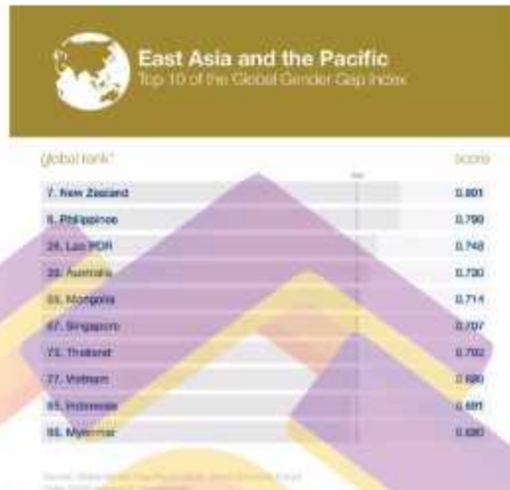
Di beberapa negara berkembang, kesetaraan gender masih sering ditanyakan eksistensi dan kebermanfaatannya terhadap negara dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sistem patriarkis yang sudah sejak lama menguasai sistem politik di negara-negara tersebut. Di kawasan Asia Tenggara, nilai-nilai 'ketimuran' memberikan sistem patriarki kebebasan untuk menyisihkan perempuan dengan cara pembangunan dikotomi antara ranah publik dan ranah privat. Keberadaan hal tersebut membuat perempuan menjadi semakin termarginalisasi oleh lingkaran yang dibentuk patriarki, yang kemudian membuat gerak perempuan dalam dunia politik menjadi sempit karena perempuan tidak dapat bergerak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan politik (Abror, 2018, p. 2). Namun, seiring dengan berjalannya waktu telah banyak negara yang kemudian sedikit demi sedikit menyingkirkan sistem patriarki dan mulai mengimplementasikan kesetaraan gender dalam ranah publik seperti dunia politik. Indonesia dan Filipina merupakan contoh dari negara yang eksistensi kesetaraan gendernya sudah mulai terlihat dan terus berkembang dalam upaya untuk memperbaiki negara, baik dari sisi domestik maupun internasional.

Transisi dari negara patriarki menjadi negara dengan kesetaraan gender yang baik tentu saja bukan merupakan hal yang mudah. Baik Indonesia maupun Filipina memiliki proyeksinya masing-masing mengenai kesetaraan gender, terlebih apabila membicarakan kebijakan luar negeri yang menjadi tanduk dari hubungan internasional dengan negara lainnya. Tercatat oleh data yang diperoleh dari *Global Gender Gap Report* pada tahun 2018, ditemukan fakta bahwa Filipina menduduki peringkat pertama negara dengan kesetaraan gender terbaik di Asia, menduduki urutan pertama di Asia Tenggara, dan juga menduduki urutan ke-8 secara global dari 149 negara. Sementara itu, Indonesia sendiri tercatat berada dalam urutan ke-85 dari 149 negara secara global, dan menduduki urutan ke-9 di Asia, serta urutan ke-7 di Asia Tenggara (*World Economic Forum, 2018, p. 11*). Data tersebut sendiri menunjukkan indeks kesetaraan gender dalam segala aspek di Indonesia dan Filipina, dari ekonomi, sosial, maupun politik.



Gambar 1. 1 Top 10 Negara dengan kesetaraan gender terbaik di dunia menurut Global Gender Gap Report tahun 2018

Sumber: World Economic Forum, 2018.



Gambar 1. 2 Peringkat dari negara-negara dalam kawasan East Asia dan the Pacific dalam Global Gender Gap Report tahun 2018. Peringkat yang tertera merupakan peringkat secara global

Sumber: World Economic Forum, 2018

Hal ini tentu saja kemudian menimbulkan sebuah komparasi antara keduanya, terlebih muncul pertanyaan apakah kesetaraan gender di kedua negara tersebut dipengaruhi oleh hal-hal lain yang membuat data statistik yang ditemukan memiliki jarak yang cukup besar satu sama lain. Hal tersebut pun kerap kali dianggap sepele dalam ilmu hubungan internasional dan juga politik luar negeri karena kerap kali tersingkir oleh aspek-aspek lain, contohnya ekonomi dan perdagangan internasional. Meskipun begitu, kesetaraan gender sendiri merupakan suatu elemen penting dalam sebuah negara, yang juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas *SDGs* yang ada di negara tersebut, baik di dalam maupun antar negara, dimana hubungan internasional berada (United Nations, 2019, p. 33).

Namun, meskipun memiliki data statistik yang cukup berbeda dalam pelaksanaan kesetaraan gender, pada kenyataannya Filipina dan Indonesia dapat dikatakan memiliki beberapa kesamaan dalam pemberlakuan kesetaraan gender di negaranya, yang dimana keduanya lebih memberatkan pada gerakan-gerakan feminisme yang ada dibandingkan pemberlakuan langsung dari pemerintah melalui hukum dan kebijakan yang ada. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai alasan perbedaan pada kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri di kedua negara tersebut, terlebih karena kesetaraan gendernya sendiri lebih dimerdekakan oleh yang teropresi dalam ketidaksetaraan gender, yaitu perempuan. Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti tentang implementasi kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri di Indonesia dan Filipina, serta posisi perempuan dalam pemerintahan sebagai pemangku kebijakan. Penulis juga ingin meneliti mengenai perbandingan antara kesetaraan gender di dua negara tersebut dan apa yang membuat terjadi *gap* antar dua negara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana Indonesia dan Filipina melibatkan perempuan sebagai usaha menerapkan kesetaraan gender dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk melakukan komparasi tentang bagaimana Indonesia dan Filipina melibatkan perempuan dalam pembuatan kebijakan luar negerinya;
2. Bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesetaraan gender dan kebijakan luar negeri dalam peningkatan efektivitas ekonomi dan pembangunan Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan mengenai kesetaraan gender, terutama pada negara Indonesia dan Filipina, serta proses pembuatan kebijakan luar negeri di kedua negara yang melibatkan kesetaraan gender itu sendiri.

2. Manfaat praktis

a) Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai kesetaraan gender, keterwakilan perempuan, dan proses pembuatan kebijakan luar negeri, serta hubungan ketiganya dengan pembangunan Negara, terutama Negara berkembang.

b) Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan ilmu dalam kajian literatur Hubungan Internasional, terutama mengenai konsep kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan yang mengambil peran penting dalam implementasi kesetaraan gender pada pembuatan kebijakan luar negeri di Indonesia dan Filipina.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian dan setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub-bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, hingga sistematika masing-masing bab yang akan penulis kaji.
2. Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis dari penelitian yang dilakukan.
3. Bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan mengenai teknik analisis data serta variabel penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
4. Bab keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, penulis akan menyediakan hasil analisis dan bukti-bukti yang ditemukan dari permasalahan penelitian mengenai perbandingan implementasi studi kesetaraan gender, terutama dalam aspek keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, pada kebijakan luar negeri di Indonesia dan Filipina yang relevan dengan teori, konsep, dan/atau hipotesis, serta metode penelitian yang digunakan.
5. Bab kelima, yaitu penutup. Bagian ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian, dan berisikan kesimpulan mengenai argumen yang dihasilkan dari penelitian.